



# **LAPORAN KINERJA TAHUN 2023**

**BIRO PEREKONOMIAN  
SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**2024**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan dimasa mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara optimal.

Laporan Kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah secara umum.



KEPALA BIRO PEREKONOMIAN,

SAID SALIM, S.Kom  
Pembina Tk. I

NIP. 197207041993031004

## DAFTAR ISI

KATA PEGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Gambaran Umum OPD .....	2
D. Capaian Reformasi Birokrasi .....	7
E. Isu Strategis .....	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	9
A. Rencana Strategis .....	9
B. Strategi dan Kebijakan .....	11
C. Perjanjian Kinerja .....	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	19
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	19
B. Analisis Penyebab Keberhasilan .....	21
C. Analisis Pencapaian Kinerja .....	21
D. Realisasi Anggaran .....	22
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	25
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah merupakan unit kerja yang berada dalam lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan berfungsi sebagai pembantu Gubernur dalam ketersediaan data terkait pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugasnya Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) yang dalam tugas dan kewenangannya di bidang perekonomian dan pembangunan.

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 ini mendasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja dari Kepala Biro Perekonomian sebagaimana kontrak kerja yang telah ditandatangani/disepakati sekaligus sebagai amanah yang telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat;
2. Mengetahui capaian kinerja program yang telah dilakukan oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan indikator program sesuai rencana strategis yang telah ditetapkan ;
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan setiap tahun agar dapat melakukan perbaikan kedepannya;
4. Memberikan evaluasi dan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

### **C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah**

#### **1. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah.**

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan, pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

---

Kebijakan Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.

Fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah;
2. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah;
3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

### **2. Struktur Organisasi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022, maka struktur organisasi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

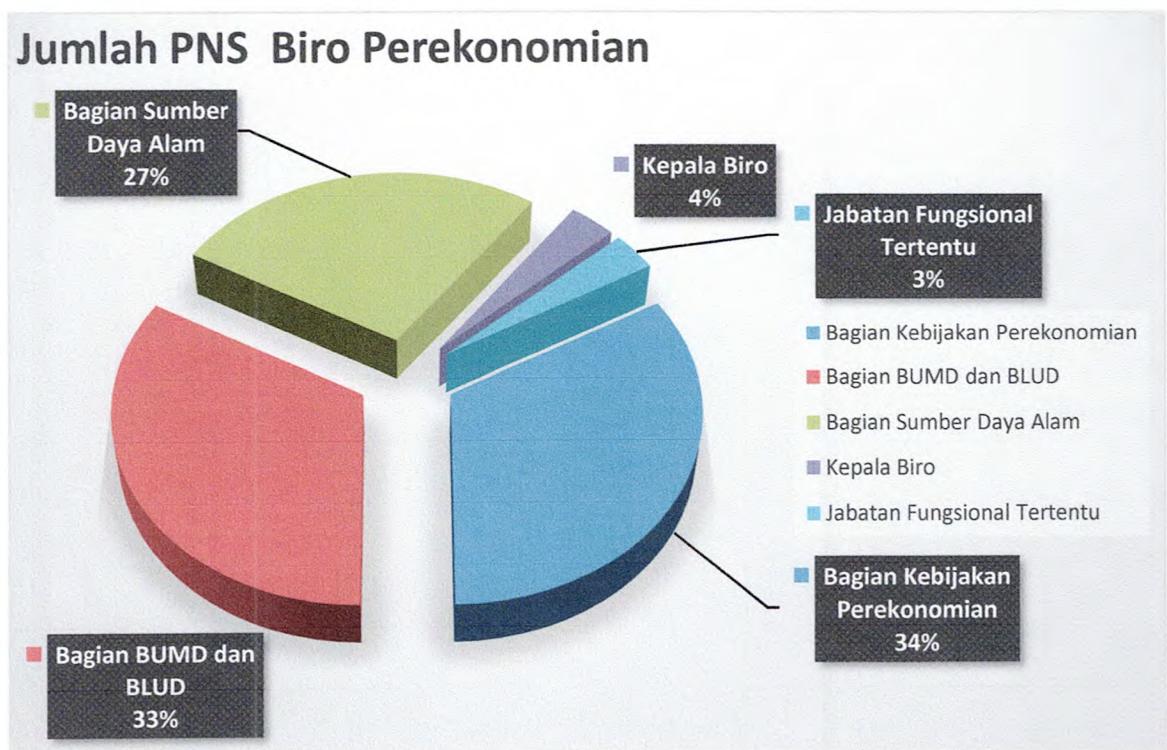
- a. Kepala Biro
- b. Bagian Kebijakan Perekonomian, terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro;
  - b. Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro;
  - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
- c. Bagian Sumber Daya Alam, terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Sumber Daya Alam, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
  - b. Sub Bagian Sumber Daya Alam, Pertambangan, dan Lingkungan Hidup;
  - c. Sub Bagian Sumber Daya Alam Energi dan Air;

- d. Bagian BUMD dan BLUD, terdiri atas :
  - a. Sub Bagian BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha;
  - b. Sub Bagian BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
  - c. Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah;

### 3. Keadaan Personil dan Kepegawaian

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 sebagai berikut :

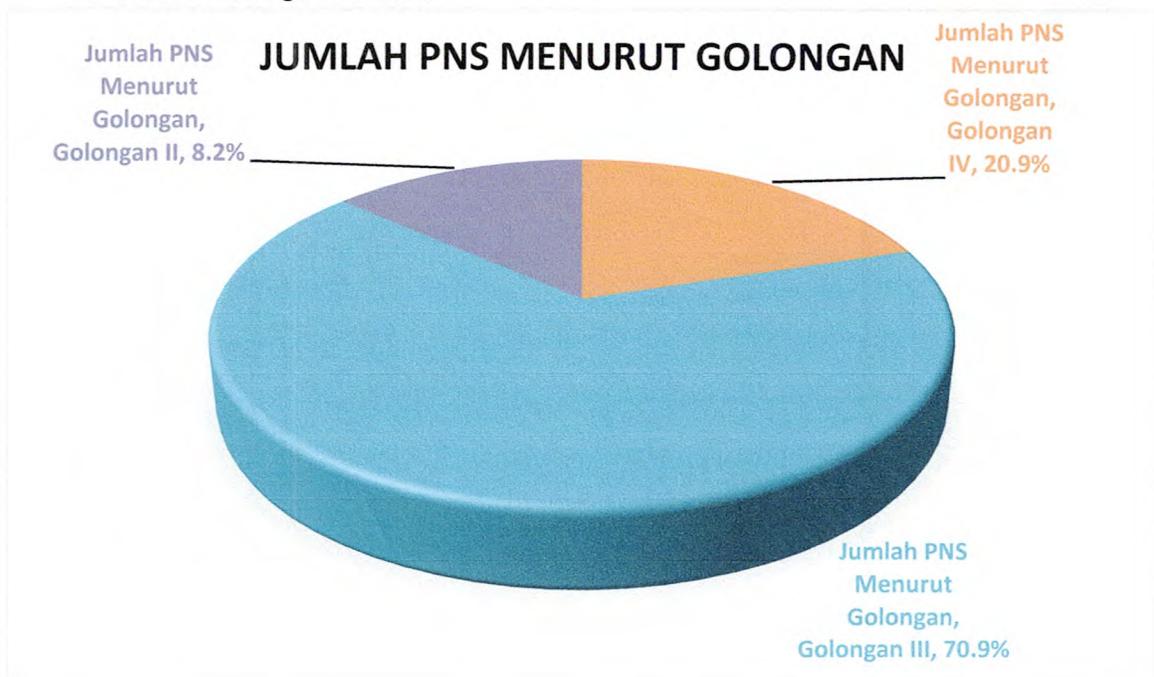
- a) Jumlah Pegawai Negeri Sipil Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 mencapai 24 Orang dengan rincian sebagai berikut: Kepala Biro 1 Orang, Bagian Kebijakan Perekonomian 9 Orang, Bagian BUMD dan BLUD 6 Orang, Bagian Sumber Daya Alam 7 orang,
- b) Jabatan Fungsional Tertentu 1 Orang. Dalam pelaksanaan tugasnya, Biro Perekonomian juga dibantu oleh tenaga kontrak sebanyak 4 orang. Berikut rincian sebaran PNS Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah:



**Gambar 1.1**  
**Jumlah PNS Biro Perekonomian SetdaProv.Kalteng**

Jika dilihat dari Gambar 1.1 di atas, jumlah PNS Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah terbanyak terdapat di Bagian Kebijakan Perekonomian sekitar 34% dari total jumlah pegawai Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan BUMD dan BLUD sebesar 33%, Sumber Daya Alam 27%.

- c) Jumlah PNS menurut golongan : Golongan IV sebanyak 5 Orang, Golongan III sebanyak 17 Orang, Golongan II sebanyak 2 Orang, dengan rincian sebagai berikut:



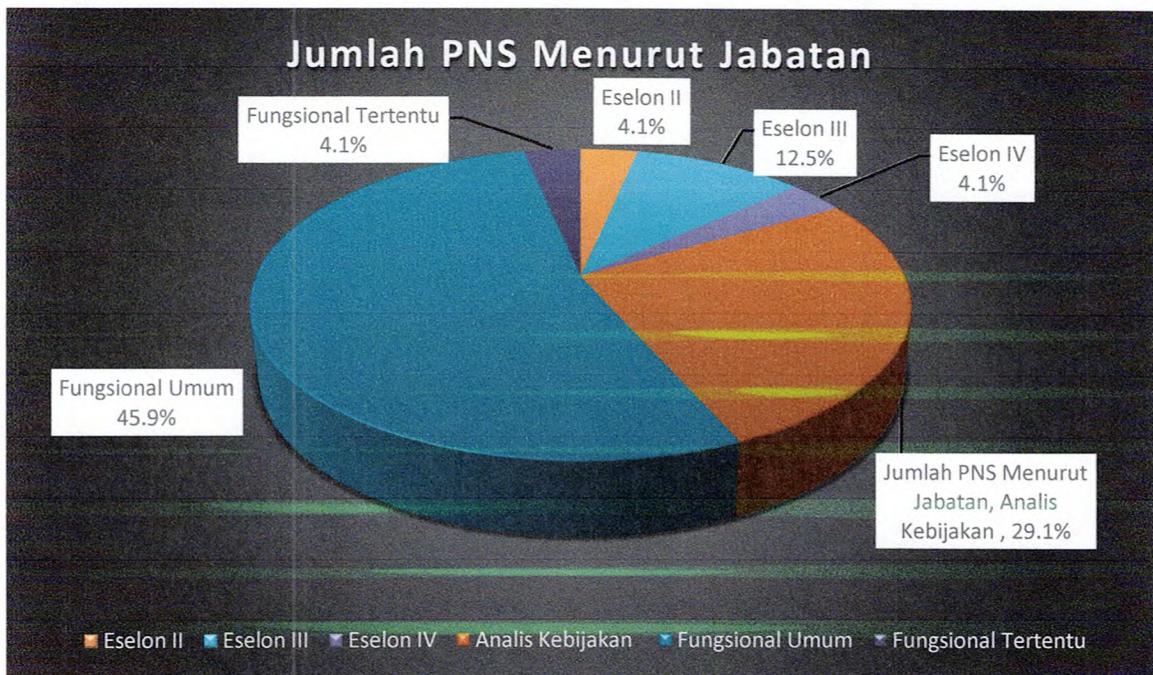
**Gambar 1.2**  
**Jumlah PNS Biro Perekonomian Menurut Golongan**

Jika dilihat dari Gambar 1.2 di atas, jumlah PNS menurut golongan pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah terbanyak yakni Golongan III sekitar 70.9% dari total jumlah pegawai, Golongan IV sebesar 20.9%, dan Golongan II sebesar 8.2%.

- d) Jumlah PNS Biro Perekonomian Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah menurut Jabatan terdiri atas Eselon II.b sebanyak 1 orang, Eselon III.a sebanyak 3 orang, Eselon IV.a sebanyak 1 orang, Analisis

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

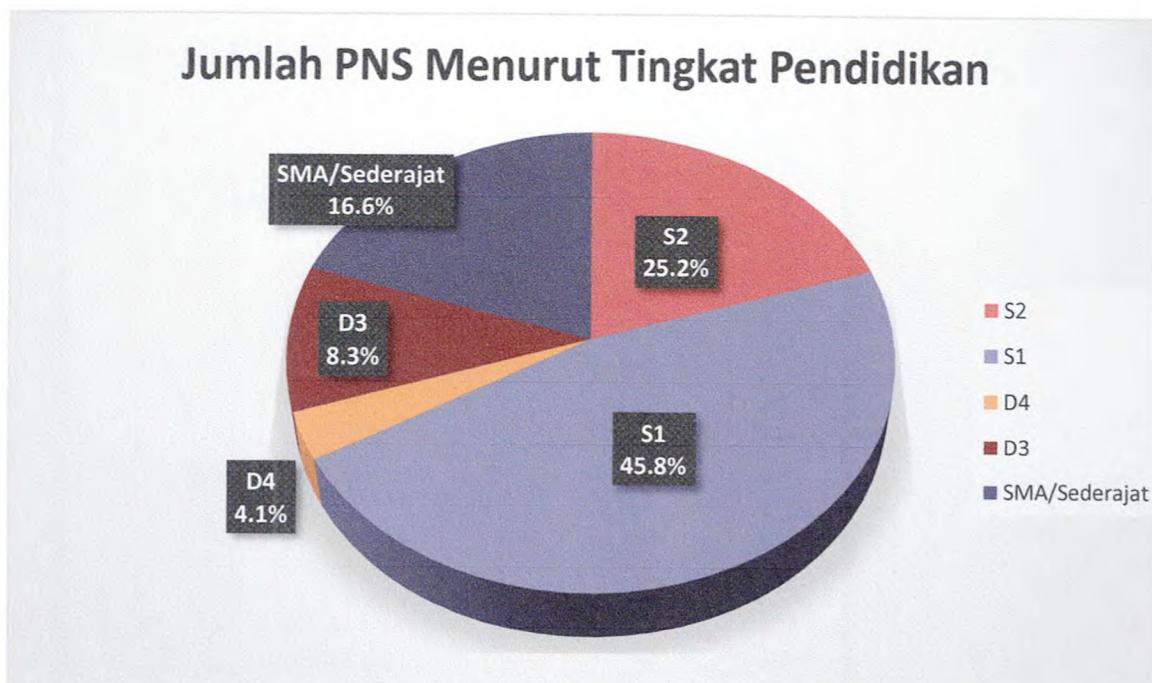
Kebijakan sebanyak 7 orang, Fungsional Umum sebanyak 11 orang, dan Fungsional Tertentu sebanyak 1 orang, sehingga sebarannya dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 1.3**  
**Jumlah PNS Biro Perekonomian Menurut Jabatan**

Jika dilihat dari Gambar 1.3 di atas, jumlah PNS menurut Jabatan pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah terbanyak yakni Jabatan Fungsional Umum sebesar 45.9% dari total jumlah pegawai, Analisis Kebijakan sebesar 29.1%, Eselon IV.a sebesar 4.1% Eselon III.a sebesar 12.5% Fungsional Tertentu sebesar 4.1%, dan Eselon II.b sebesar 4.1%.

- e) Jumlah PNS Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah menurut Tingkat Pendidikan yakni: S2 sebanyak 6 orang, S1 sebanyak 11 orang, D4 sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 2 orang, SMA/Sederajat sebanyak 4 orang, dengan gambaran sebagai berikut:



**Gambar 1.4**  
**Jumlah PNS Biro Perekonomian Menurut Tingkat Pendidikan**

Jika dilihat dari Gambar 1.4 di atas, jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah terbanyak yakni S-1 sebesar 45.8% dari total jumlah pegawai, S-2 sebesar 25.2% dan, D-4 sebesar 4.1%, D-3 sebesar 8.3%, dan SMA sebesar 16.6%.

**D. Capaian Reformasi Birokrasi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.**

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Target kinerja ini dimunculkan pada tahun 2023 untuk mengukur sejauh mana perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik,

netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

### **E. Isu Strategis/Permasalahan**

Isu penting yang strategis yang patut diangkat dalam Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah ini dan perlu disiapkan landasan-landasannya untuk tahap pembangunan berikutnya adalah tentang perlunya :

1. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan belum berjalan optimal;
2. Sistem, prosedur dan mekanisme kerja birokrasi belum terlaksana secara efisien dan efektif;
3. Kompetensi dan distribusi sumber daya aparatur belum merata;
4. Masih rendahnya disiplin dan budaya kerja aparatur dalam melaksanakan tugas pengabdian sebagai pelayan masyarakat; dan
5. Belum optimalnya koordinasi antara Perangkat Daerah, sehingga pelaksanaan tugas antar Perangkat Daerah kurang sinergis dan tidak terkoordinir dengan baik.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan umum disusunnya perencanaan kinerja adalah dalam rangka intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik; percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi.

Untuk itu, penyusunan perencanaan kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada indikator kinerja utama tahun 2023, dokumen rencana kinerja tahunan tahun 2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023, prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2023 serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023.

Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya peningkatan visi dan misi dan akan menjadi komitmen Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencapainya dalam tahun 2023.

### **A. Rencana Strategis**

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, maka diperlukan dasar-dasar nilai yang tertanam di setiap pegawai Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebagai landasan dedikasi, prestasi dan partisipasinya. Pembangunan di Kalimantan Tengah menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada, namun juga mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Permasalahan yang dihadapi di Kalimantan Tengah antara lain kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan,

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

---

terbatasnya kesempatan kerja, kesenjangan sosial dan lain sebagainya. Tujuan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Tujuan-tujuan tersebut di atas merupakan bagian integral dalam aktivitas Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan dan operasionalnya.

Sasaran Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur dan dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam waktu satu tahun atau beberapa tahun. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Persentase Pertumbuhan Ekonomi.
2. Menekan Angka Inflasi Daerah.

Tujuan dan sasaran disajikan pada tabel 2.1 dibawah ini

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Terwujudnya Kebijakan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi di Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Meningkatnya Persentase Pertumbuhan Ekonomi.</li><li>➤ Menekan Angka Inflasi Daerah.</li><li>➤ Terwujudnya peningkatan kinerja program dan percepatan akses keuangan daerah.</li></ul>

**B. Strategi dan Kebijakan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah**

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah ataupun upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan, sedangkan kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut ini disajikan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah seperti pada tabel 2.2 di bawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Strategi dan Kebijakan Biro Perekonomian**

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Terwujudnya peningkatan kinerja program dan percepatan akses keuangan daerah	1) Penguatan kebijakan di Bidang Penanaman Modal, Investasi, Lembaga Keuangan dan BUMD melalui Sistem Terintegrasi yang mendorong Iklim Investasi yang kondusif	1. Peningkatan Sistem Satu Data dan Informasi Terintegrasi untuk Mengembangkan Daya Saing Daerah dan Promosi Potensi Daerah; 2. Penguatan Sistem Koordinasi, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi di Bidang Lembaga Keuangan Daerah Penguatan Manajemen dan <i>Capacity Building</i> SDM BUMD.
		2) Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Air;	1. Penguatan Sistem Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Energi dan Air;

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	<p>Terwujudnya peningkatan kinerja program dan percepatan akses keuangan daerah</p>	<p>3) Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Pertambangan dan LH;</p> <p>4) Penguatan Ketersediaan Pangan Strategis Berbasis Sumber Daya Lokal dan Kelancaran Distribusi Pangan Berbasis Teknologi Informasi;</p> <p>5) Penguatan Sistem Perekonomian di Bidang Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan</p>	<p>2. Penguatan Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup berbasis masyarakat dan pengamanan serta melalui Rehabilitasi Lahan Kritis Pertambangan;</p> <p>3. Peningkatan sistem Ketersediaan Pangan Melalui Cadangan Pangan, Akses Pangan dan Konsumsi Pangan berbasis Masyarakat Lokal dan Informasi Teknologi serta Peningkatan <i>Capacity Building</i>;</p> <p>4. Pengembangan Agrobisnis dan Agro Industri di Bidang Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya lokal sebagai sumber daya perekonomian;</p> <p>5. Peningkatan sistem pengelolaan sumber daya mineral berbasis masyarakat.</p>

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Terwujudnya peningkatan kinerja program dan percepatan akses keuangan daerah	6) Peningkatan Kinerja Program dan Percepatan Akses Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kebijakan struktur industri daerah melalui peningkatan pengembangan pengelolaan BUMD untuk peningkatan ekonomi daerah;</li> <li>2. Pengembangan sistem pengelolaan analisis ekonomi Makro berbasis Teknologi Tepat Guna dan Mengoptimalkan Peran Perbankan terutama Penyaluran Pembiayaan bagi UMKM serta mendorong Bumdes untuk mengembangkan UMKM maupun Koperasi;</li> <li>3. Peningkatan Industri Investasi berbasis Kreativitas yang mempunyai unggulan komparatif dan kompetitif;</li> <li>4. Peningkatan industri dan investasi di bidang pariwisata berbasis unggulan alam dan budaya serta melakukan promosi destinasi wisata melalui Teknologi Informasi;</li> </ol>

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan
4.	Terwujudnya peningkatan kinerja program dan percepatan akses keuangan daerah	7) Penguatan TPID Provinsi, Kabupaten/Kota, percepatan akses keuangan daerah melalui Bumdes dan desa berbasis teknologi keuangan.	Pengembangan sistem pengendalian inflasi daerah berbasis TPID pedesaan dan Teknologi Informasi

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja tahun 2023 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah sehingga istilah Perjanjian Kinerja masih menggunakan istilah Penetapan Kinerja. Adapun penetapan kinerja pemerintah Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah  
Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
	Terwujudnya peningkatan kinerja program dan percepatan akses keuangan daerah.	1. Persentase Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Persentase	6,50- 7,0
		2. Laju Inflasi	Persentase	3,96 - 4,96
		3. Jumlah Dokumen Peraturan BUMD yang disahkan oleh Kepala Daerah	Juta (Rp)	5
		4. Jumlah SK Tim Penilaian BLUD	Persentase	5
		5. Jumlah SK Tim Penetapan BLUD	Rasio	2
		6. Jumlah Dokumen Bagian Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Dokumen Laporan	2
		7. Jumlah Dokumen Bagian Energi dan Air	Dokumen Laporan	2
		8. Jumlah Dokumen Bagian Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen Laporan	2

Jumlah anggaran tahun 2023 adalah Rp. 3.445.354.027 (Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah). Program dan kegiatan yang ada pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan APBD Provinsi Kalimantan Tengah dengan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :DPPA/B.1/4.01.2.10.0.00.01.0000/001/2023 Tgl 06 Oktober 2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).

Penetapan kinerja merupakan unsur penting dalam akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan. Adapun Penetapan Kinerja yang digunakan dalam rencana strategis, adalah sebagai berikut :

# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**Tabel 2.4**

**Penetapan Kinerja dalam rencana strategi**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke -					
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Terwujudnya Kebijakan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi di Kalimantan Tengah	Terwujudnya peningkatan kinerja program dan percepatan akses keuangan daerah	Pertumbuhan dan pemerataan Ekonomi yang meningkat	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	
			Terkendalinya Inflasi Daerah	4,74%	4,85%	4,90%	5,00%	4,74%	
			Persentase terlaksananya kebijakan sektor Investasi dan Penanaman Modal	60%	70%	75%	80%	100%	
			Persentase kinerja Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD	60%	70%	75%	80%	100%	
				Persentase terlaksananya kebijakan di sektor BUMD	60%	70%	75%	80%	100%
			Terwujudnya peningkatan kinerja program dan percepatan akses keuangan daerah	Persentase terlaksananya kebijakan sektor Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan yang ditindaklanjuti	70%	75%	80%	85%	90%
				Persentase terlaksananya kebijakan sektor Sumber Daya Alam Energi dan Air yang ditindaklanjuti	70%	75%	80%	85%	90%
				Persentase terlaksananya kebijakan sektor Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang	70%	75%	80%	85%	90%

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke -				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ditindaklanjuti					
			Persentase terlaksananya kebijakan di sektor inflasi daerah	60%	70%	80%	90%	100%
			Persentase terlaksananya kebijakan percepatan akses keuangan daerah	60%	70%	75%	80%	100%
			Terwujudnya Kebijakan Pengelolaan Ekonomi di bidang Makro	55 Unit	56 Unit	57 Unit	59 Unit	60 Unit
			Terwujudnya Kebijakan Pengelolaan Ekonomi di bidang Mikro	55 Unit	56 Unit	57 Unit	59 Unit	60 Unit
			Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	55 Unit	56 Unit	57 Unit	59 Unit	60 Unit
			Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	55 Unit	56 Unit	57 Unit	59 Unit	60 Unit
		Terwujudnya peningkatan kinerja program dan percepatan akses keuangan daerah	Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	55 Unit	56 Unit	57 Unit	59 Unit	60 Unit
			Terwujudnya	55 Unit	56 Unit	57	59	60

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke -				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi			Unit	Unit	Unit
			Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	55 Unit	56 Unit	57 Unit	59 Unit	60 Unit

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah**

Pengukuran kinerja adalah untuk menilai pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuan lainnya adalah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indikator output saja, tetapi juga outcome, manfaat dan dampak serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada tabel 3.1 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	> 91	Sangat Tinggi
2.	76 < 90	Tinggi
3.	66 < 75	Sedang
4.	51 < 65	Rendah
5.	< 50	Sangat Rendah

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Adapun tingkat capaian kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya di atas dapat diilustrasikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Terwujudnya peningkatan kinerja program dan percepatan akses keuangan daerah	Persentase Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	6.0 - 7.0	6.0 - 7.0	100 %
		Laju Inflasi	3.96 - 4.96	2.64	100 %
		Jumlah Dokumen Peraturan BUMD yang disahkan oleh Kepala Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %
		Jumlah SK TIM Penilaian BLUD	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %
		Jumlah SK TIM Penetapan BLUD	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
		Jumlah Dokumen Bagian Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
		Jumlah Dokumen Bagian Energi dan Air	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
		Jumlah Dokumen Bagian Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %

Capaian kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah hingga akhir tahun 78.99% yang artinya realisasi kinerja cukup tinggi. Hal ini dikarenakan adanya sasaran strategis yang realisasinya kurang, terutama pada sasaran strategis terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengembangan promosi daerah dan investasi.

### **B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.**

1. Penyebab keberhasilan :
  - a. Dukungan dana yang mencukupi.
  - b. Adanya kerja sama yang baik.
2. Penyebab kegagalan :
  - a. Perencanaan yang tidak tepat.
  - b. Prasarana dan sarana pendukung yang kurang.
  - c. Kualitas dan kuantitas SDM tidak memadai.
3. Strategi/Upaya Pemecahan Masalah :
  - a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang bersifat teknis terkait mengenai semua bidang yang berkaitan dengan bagian yang ada di Biro Perekonomian.
  - b. Mengadakan sarana dan prasarana yang pendukung.
  - c. Meningkatkan koordinasi dengan instansi teknis terkait dengan sesuai bidang tugasnya.

### **C. Analisis Pencapaian Kinerja**

Kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Perekonomian secara tidak langsung turut mempengaruhi Nilai Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi Daerah, dan Kestabilan Harga.

Kegiatan untuk mengendalikan laju inflasi adalah dengan membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah yang merencanakan aksi pengendalian inflasi Provinsi Kalimantan Tengah dan rencana pengawalan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah Tahun 2023. Kegiatan ini berupa rapat-rapat koordinasi baik tingkat Wilayah Regional Kalimantan, Provinsi Kalimantan Tengah maupun skala Nasional. Di samping itu terdapat pula rapat-rapat teknis dan siaran pers yang dilaksanakan setiap bulan.

Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat mengendalikan inflasi di Kalimantan Tengah dan pengawalan pertumbuhan ekonomi sesuai arahan RPJMD. Selain itu juga melaksanakan rapat koordinasi pengawalan pertumbuhan ekonomi provinsi Kalimantan Tengah dengan susunan rencana aksi SKPD:

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

---

1. Berdasarkan Target Pertumbuhan Ekonomi, Prediksi Inflasi dan peningkatan daya beli masyarakat.
2. Penentuan Besaran Kontribusi sektor, subsektor dan subsektor/komoditas sebagai berikut :
  - a. Berdasarkan data historis 5-10 tahun terakhir ditetapkan kontribusi masing-masing sektor dan subsector terhadap pembentukan PDRB
  - b. Penentuan kontribusi dari masing-masing komoditas pada subsector dilaksanakan oleh SKPD terkait. Contoh untuk subsector perkebunan, penentuan komoditasnya (kelapa sawit, karet, dan sebagainya) ditetapkan oleh Dinas Perkebunan)
  - c. Seterusnya Volume produksi selama setahun dikalikan dengan nilai tambah akan diketahui nilai PDRB komoditas.

Dengan menjumlahkan seluruh nilai PDRB komoditas akan didapat nilai PDRB subsektor dan dengan menjumlahkan semua nilai PDRB sub sector akan didapat nilai total PDRB sektor.

### **D. Realisasi Anggaran**

Pada anggaran tahun 2023 Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah belanja langsung yang ada pada Biro Perekonomian adalah Rp.3.445.354.027,-yang terdiri dari :

- a. Belanja Operasi : Rp. 3.334.054.027,-
- b. Belanja Modal : Rp. 111.300.000,-

Terdapat efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan diantaranya sebagai berikut :

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Anggaran**

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah .	20.000.000	19.962.000	37.400
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	10.000.000	9.987.600	12.400
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	35.000.000	25.035.000	9.965.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah.	1.131.466.437	1.127.460.400	4.006.037
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	408.610.470	374.113.296	34.497.174
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.000.000	117.661.350	2.338.650
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	718.027.120	674.353.206	43.673.914
		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	888.250.000	267.328.172	620.921.828
		Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	114.000.000	105.614.000	8.386.000

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

---

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dari 2 program dan 9 kegiatan yang diprogramkan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2023 tidak ada kegiatan yang tidak terlaksana.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2023. Dengan kata lain, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja pemerintah Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 3.445.354.027, jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 2.721.515.624 atau sebesar 78.99%. Keberhasilan capaian kinerja tahun 2023 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah akan melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja diatas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Palangka Raya, Januari 2024  
KEPALA BIRO PEREKONOMIAN,  
  
SAID SAJIM, S.Kom  
Pembina Tk. I  
NIP. 197207041993031004